

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PENYERTAAN DAN PERBARENGAN DALAM EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PARA FOTOGRAFER DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN

Nama : Michael Gilrandy Kurniawan
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum telah diatur Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu implementasi dari ketentuan tersebut yakni Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum pada seluruh warga negara, termasuk terhadap anak-anak. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi eksploitasi sebagai suatu tindakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Salah satu bentuk dari eksploitasi anak adalah eksploitasi seksual, yang sejatinya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Tindakan eksploitasi tersebut sering kali menempatkan anak sebagai korbannya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya mulai dari awal 2018 hingga bulan April terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus perdagangan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak. Berdasarkan kasus tersebut, 8 (delapan) diantaranya merupakan kasus anak, 13 (tiga belas) kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak, 9 (sembilan) kasus prostitusi anak dan 2 (dua) kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak. Berdasarkan fakta tersebut diperlukan adanya perlindungan khusus kepada anak. Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindakan eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya.

Kata Kunci: *Anak, Eksploitasi seksual, fotografi.*



CRIMINAL LIABILITY, ENCOURAGEMENT AND CONCLUSION IN THE SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN BY PHOTOGRAPHERS REVIEWING FROM THE LAW

Name : Michael Gilrandy Kurniawan
Dicipline/Study Programe : Ilmu Hukum
Contributors : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

Indonesia is a country based on law. The existence of Indonesia as a state of law has been regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the implementations of this provision is that the Government of Indonesia is obliged to provide legal protection for all citizens, including children. The Big Indonesian Dictionary provides a definition of exploitation as a use of exploitation for one's own benefit, extortion of others which is an act that is not commendable. One of the exploitation of children is sexual exploitation, which is actually a violation of children's rights. These exploitation actions often place children as victims, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) noted that from early 2018 to April there were 32 (thirty-two) cases of trafficking and exploitation committed against children. Based on these cases, 8 (eight) of them are cases of child trafficking, 13 (thirteen) cases of commercial exploitation of children, 9 (nine) cases of child prostitution and 2 (two) cases of economic exploitation of children. Based on these facts, special protection is needed for children. The Government of the Republic of Indonesia enacted Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection jo. Law Number 35 of 2014 jo. Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, to ensure the fulfillment of children's rights. The writing of this scientific paper uses the normative juridical method. The results of the study explain that acts of exploitation of children committed by perpetrators can be categorized as criminal acts based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and their amendments and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and its amendments.

Keywords: *Child, Sexual exploitation, photography.*